

LAPORAN KERJA MENTERI PP DAN PA REPUBLIK INDONESIA

No.	Kegiatan	Uraian Kegiatan	Pihak yang Terlibat	Perubahan (Tindaklanjut)	Keterangan
A. BULAN JANUARI 2016					
1.	Menindaklanjuti hasil sidang Kabinet Paripurna tanggal 4 Januari 2016.	<p>1. Melakukan rapat pimpinan dengan Para Eselon I Kementerian PP-PA pada tanggal 6 Januari 2016, untuk membahas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rancangan Perpres Kebiri b. Program unggulan KemenPP-PA: <ul style="list-style-type: none"> 1) Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak 2) Akhiri perdagangan orang 3) Akhiri kesenjangan ekonomi <p>2. Melakukan pertemuan dengan</p>	<p>Eselon I-II KemenPP-PA Menteri Hukum dan HAM Jaksa Agung Menko PMK</p>	<p>Rancangan Perpres Kebiri telah diambil alih Menko PMK untuk melanjutkan.</p> <p>Eselon I dan II melakukan revisi/perubahan program dan kegiatan agar mendukung 3 program unggulan.</p> <p>Menyusun kegiatan yang memiliki dampak langsung kepada masyarakat.</p>	<p>3 program unggulan dikemas menjadi 3 ENDS.</p>

		Menteri Hukum dan HAM, dan Jaksa Agung.			
	Menghadiri acara promosi Jeanne Noveline Tedja menjadi doktor dalam ilmu Kesejahteraan Sosial atas disertasi “Penyelenggaraan kebijakan Kota Layak Anak di Kota Depok” Di Kampus UI Depok, pada tanggal 9 Januari 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan apresiasi, karena salah satu kebijakan KemenPP-PA yakni penyelenggaraan Kota Layak Anak dijadikan topic bahasan dalam disertasi untuk pengukuhan gelar DR. Jeanne Noveline Tedja. 2. Meminta Deputi PA dan Deputi TKA untuk menyederhanakan indikator Kota Layak Anak (KLA) agar mudah dicapai oleh Kab/Kota, utamanya dalam memberikan perlindungan kepada anak. 	Dosen dan Mahasiswa UI Depok. Deputi PA dan Deputi TKA KemenPP-PA	Penyempurnaan indicator KLA sedang dalam proses pembahasan.	

2.	Mengunjungi anak yang diduga korban penganiayaan, pada tanggal 12 Januari 2016.	<p>Bertemu dg keluarga dan anak korban penganiayaan.</p> <p>Mengunjungi anak yang diduga korban penganiayaan di Rumah Sakit Prikasih, Pondok Labu, berkoordinasi dengan pihak kepolisian agar pelaku dikenakan sanksi yang berat berdasarkan UU No. 35 Tahun 2015 ttg Perlindungan Anak.</p>	<p>Keluarga dan Anak yang diduga menjadi korban.</p> <p>Polsek Pondok Labu</p>	<p>Pengawasan proses hukum.</p> <p>Pidana diberikan sesuai dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002.</p>	
	Mendampingi Presiden menerima audiensi dari Komnas PA di Istana Negara, pada tanggal 12 Januari 2016.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendampingi Presiden menerima audiensi Komnas PA; 2. Merancang kampanye bersama untuk stop kekerasan anak. 	Komnas PA Kemenko PMK Deputi PA	<p>Stranas PKtA telah disusun dan diluncurkan.</p> <p>Beberapa pimpinan daerah, diantaranya Bupati Sanggau berkomitmen untuk memulai Kampanye Stop Kekerasan.</p> <p>Kesepakatan pelaksanaan peringatan hari anak dilakukan di Mataram dan melibatkan banyak anak, khususnya dari kelompok rentan.</p>	
	Merancang Peringatan Hari Kartini sebagai	Melakukan pertemuan dengan Bupati Jepara di Kemen PPPA. Untuk	Bupati Jepara Kepala Badan PP-PA Provinsi seluruh	Komitmen daerah untuk memberikan akses kepada perempuan pelaku IR	

	momentum untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi, tanggal 14 Januari 2016.	merumuskan festival kartini sebagai momentum untuk mengakhiri kesenjangan ekonomi, khususnya perempuan pelaku industri rumahan kecil.	Indonesia Perempuan pelaku IR skala kecil.		
	Pertemuan UNICEF , tanggal 18 Januari 2016	Melakukan diskusi program kerja sama KemenPP-PA dengan UNICEF tahun 2016-2017.	Ibu Gunilla, Ibu Laurent UNICEF	UNICEF berkomitmen bahwa program Kerjasama KemenPP-PA dengan UNICEF untuk mendukung capaian kinerja yang ditargetkan dalam atau sejalan dengan RPJMN 2015-19.	
	Pertemuan dengan Menteri Pariwisata dan IWC di Ruang Kerja Menteri Pariwisata, tanggal 19 Januari 2016.	Mendiskusikan mengenai keterkaitan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam program pariwisata, khususnya dalam pencegahan anak dari eksploitasi seksual di daerah destinasi pariwisata.	Menteri Pariwisata dan IWC	Menteri Pariwisata berkomitmen bahwa seluruh destinasi pariwisata yang menjadi prioritas dikembangkan pada 2016 - 2017 akan memperhatikan perlindungan kepada anak-anak yang ada di daerah tersebut dari eksploitasi seksual.	
	Kunjungan kerja ke BIAK, tanggal 22-23 Januari 2016.	1. Melakukan dialog dengan guru dan anak didik di sekolah SD YPK IV Koror Sburia, SMP dan SMA YPK 1	Peserta didik dan guru di sekolah setempat. Penghuni panti Polres Biak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komitmen warga sekolah untuk menciptakan sekolah yang menyenangkan dan bebas kekerasan; 2. Komitmen berbagai pihak untuk mengedepankan pendekatan keadilan restorative dalam penanganan anak yang berhadapan dengan 	

		<p>Biak</p> <p>2. Mengunjungi Panti Sosial Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Pancasila dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Curahan Hati</p> <p>3. Melakukan sidak atas dugaan adanya perdagangan orang.</p>		<p>hukum (ABH)</p> <p>3. Pelayanan rujukan kepada korban perdagangan orang dilakukan oleh Polres Biak bersama KemenPP-PA</p>	
	Rakor Menteri tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO), tanggal 27 Januari 2016.				
BULAN FEBRUARI 2016					
	Raker dg Komite III DPD RI, tanggal 1 Februari 2016	Rapar Kerja Menteri PP-PA dengan Komisi III DPD RI untuk membahas Program Kerja 2016 dan RUU Perlindungan atas	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise	KemenPP-PA menindaklanjuti rekomendasi Raker, dengan:	
				<p>1. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antar instansi baik horizontal dan vertikal untuk menangani penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak berkenaan dengan</p>	

		<p>Kekerasan Seksual di DPR-RI</p>	<p>didampingi jajaran pejabat Eselon 1 dan 2 Kementerian PP dan PA, menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPD RI untuk memaparkan serta melakukan dialog intensif terkait Kebijakan dan alokasi anggaran kementerian PP dan PA</p> <p>Dalam Rapat Kerja tersebut, dihasilkan bahwa Komisi III DPD RI dapat memberikan apresiasi kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang telah melakukan upaya menyelenggarakan urusan</p>	<p>kemiskinan, tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi dan luntarnya nilai-nilai agama serta budaya di masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Melakukan percepatan pelaksanaan program pemberdayaan perempuan, program perlindungan perempuan dan anak serta program pemenuhan hak anak yang berkualitas 3. Mendorong terbentuknya kelembagaan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis masyarakat dan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak bagi yang belum terbentuk dan memperkuat kelembagaan perlindungan anak yang telah ada dengan menggunakan pendekatan yang melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat serta perwakilan forum anak. 4. Memastikan penanganan dan perlindungan secara responsif untuk perempuan dan anak dengan bekerjasama antar instansi terkait khususnya bagi korban kekerasan, radikalisme dan bencana alam, anak-anak suku dalam serta warga binaan di lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) 5. Membangun kerjasama yang efektif dengan Kementerian Informasi dan Komunikasi RI, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan Dewan Pers untuk menanggulangi permasalahan tayangan media yang tidak ramah anak 6. Melakukan optimalisasi proses : <ol style="list-style-type: none"> a. Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU KDRT); 	
--	--	------------------------------------	---	--	--

			pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.	dan b. Penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual 7. Melakukan optimalisasi koordinasi dan kerjasama dengan DPD RI dalam setiap program yang akan dilakukan di daerah dalam rangka upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia Memberikan akses informasi tentang anggaran dari kementerian Pemberdayaan	
	Kunjungan ke Pengungsi Gafatar di POPKI Cibubur dan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Penanganan Masyarakat Eks Gafatar di Kementerian Koordinator PMK, pada tanggal 2 Februari 2016.	Mengunjungi pengungsi Gafatar berjumlah 432 orang yang terdiri dari 246 orang laki-laki dan 186 orang perempuan. Memastikan kondisi perempuan dan anak-anak, memberikan bantuan berupa peralatan bayi dan sejumlah kebutuhan perempuan yang dapat digunakan selama mereka berada di pengungsian.	Pengungsi Gafatar, pemerintah daerah setempat	Pemda Kalbar melalui Badan PP-PA berkomitmen untuk memberikan kebutuhan spesifik perempuan dan anak, serta memberikan pendampingan dan pengawalan trauma healing, khususnya kepada anak-anak. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkomitmen untuk tetap memberikan akses pendidikan, agar anak-anak dapat kembali bersekolah setelah kembali ke kampung halaman mereka. Menteri Sosial dan Menteri Usaha Kecil dan Menengah berkomitmen untuk dapat memberikan kesempatan dan bantuan untuk usaha kecil dan menengah.	

	<p>Menghadiri acara <i>Zero Tolerance Day to Female Genital Mutilation</i> (FGM) di New York, pada tanggal 8-10 Februari 2016.</p>	<p>Menghadiri acara <i>Zero Tolerance Day to Female Genital Mutilation</i> (FGM) di New York. Pada kesempatan tersebut, Menteri PP-PA menegaskan bahwa prosedur sunat yang selama ini terjadi di Indonesia tidaklah sama dengan persepsi dunia. Pada prinsipnya Indonesia juga berkeberatan dengan praktik-praktik sunat yang berlebihan.</p>	<p>Menteri</p>	<p>Pemerintah Indonesia telah membuat beberapa kebijakan untuk mengontrol prosedur sunat perempuan, dan menyusun <i>roadmap</i> dan <i>action</i> dalam bentuk pencerahan-pencerahan.</p>	
	<p>Kampanye Gerakan Nasional Kampanye Perlindungan Perempuan dan Anak, tanggal 14 Februari 2016.</p>	<p>Gerak jalan santai bersama di GOR Bung Karno, Pentas Musik</p>	<p>Pejabat Kementerian terkait, Pelajar SMA, SMA dan SD dan masyarakat</p>	<p>Komitmen kelompok masyarakat, termasuk musisi untuk terus mengkampanyekan “bersama melindungi keluarga dan diri dari pengaruh buruk terhadap perkembangan anak”</p>	
	<p>Kunker Jombang, 18 Februari 2016</p>	<p>1. Meninjau ke Lembaga Perlindungan Perempuan dan</p>	<p>Pemerintah Kabupaten Jombang, Dekranas Industri Rumahan</p>	<p>Kementerian PP dan PA menginisiasi konsep Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan mengangkat masalah KDRT dalam slogan yang lebih ringan, yakni “<i>Bila bisa diselesaikan dengan kasih</i>”</p>	

		<p>Anak (LP2A),</p> <p>2. Berdialog dengan pengurus LP2A membahas terkait tugas dan fungsi dari LP2A.</p> <p>3. Mengunjungi Dekranas Industri Rumahan dan Karya Perempuan Kabupaten Jombang, Jawa Timur.</p> <p>4. Berdialog bersama masyarakat dan kader Bina Keluarga Lansia membahas terkait pemberdayaan perempuan, dan kesetaraan gender</p>	<p>dan Karya Perempuan, LP2A (Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak), Kader Bina Keluarga Lansia di Desa Badas kabupaten Jombang</p>	<p><i>sayang, mengapa harus menggunakan kekerasan?"</i></p>	
	<p>Bersama Menko PMK, Menteri PUPERA melakukan kunjungan ke Banteng, tanggal 19 Februari 2016.</p>	<p>Mendampingi Menko PMK melakukan kunjungan kerja ke Kab. Lebak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meresmikan 10 jembatan gantung, 2. bhakti social pengobatan gratis. 	<p>PEMDA Banten, Kementerian PUPERA</p>	<p>Adanya jembatan gantung telah memberikan kenyamanan dan keamanan kepada anak-anak yang akan mengakses sekolah.</p>	

	Raker dengan Komisi VIII DPR RI, tanggal 22 Februari 2016.	Rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI untuk membahas: 1. Evaluasi Pelaks. APBN 2015; 2. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK; 3. Isu-Isu Aktual.	Komisi VIII DPR RI	KemenPP-PA berkomitmen melaksanakan pengelolaan dan penyerapan APBN Tahun 2016 dan penyelesaian permasalahan aktual terkait perempuan dan anak dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Komisi VIII DPR RI.	
BULAN MARET 2016					
	Pemberian penghargaan kepada 10 Wanita Pejuang, tanggal 2 Maret 2016	Memberikan penghargaan kepada 10 wanita pejuang, yang telah mengabdikan kepada Negara, diantaranya Polwan Pertama, Menteri, Pengusaha, Dosen dan Istri Wakil Presiden Umar Wirahadikusuma.	Organisasi Perempuan, Pejabat KPP dan PA dan 10 Tokoh Perempuan		
	Kunker Nabire, tanggal 6 Maret 2016	1. Melakukan kunjungan ke sekolah dalam rangka sosialisasi sekolah ramah anak. 2. Memberikan bantuan berupa 1 buah unit komputer kepada SD YPK Shaloom di Distrik Makimi, SMP YPK Immanuel, dan SMA Al-Madinah di	Guru dan Siswa SD YPK Shaloom di Distrik Makimi, SMP YPK Immanuel, dan SMA Al-Madinah	meninjau kondisi rumah sakit seperti ruang rawat serta menyapa pasien perempuan serta anak yang ada di ruang perawatan.	

		Kabupaten Nabire.			
	Kunjungan kerja ke Jayapura, 8 Maret 2016	Pencanangan PIN Polio Tahun 2016 dengan memberikan vaksin polio kepada sejumlah balita di Puskesmas Sentani, Jayapura, Papua.	Pemda Jayapura	Pemda Jayapuran berkomitmen memenuhi hak anak atas kesehatan dengan memberikan vaksin polio kepada seluruh balita di Jayapura.	
	Membuka "Pengembangan Model Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat", tanggal 10 Maret 2016.	Membuka pengembangan strategi pelibatan masyarakat dalam perlindungan anak, melalui gerakan "Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)".	Kepala Badan PPPA dari 34 Provinsi.	Model akan dikembangkan di 34 provinsi, masing-masing provinsi dipilih 2 kabupaten/kota dan 2 dua di masing-masing kabupaten/kota.	
	Mengikuti sidang PBB untuk <i>Comition of Women</i> (CSW) ke-60 di New York, tanggal 14-18 Maret 2016:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan statement nasional pada sesi diskusi pleno, <i>ministerial roundtable</i> dan <i>dialog with ministers</i>. 2. Melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Peranan Perempuan Afghanistan; 	Delegasi RI: DPD RI, KemenPP-PA, Kementerian Sosial, BKKBN, Komnas Perempuan, dan KPAI serta beberapa LSM pemerhati isu perempuan di Indonesia seperti GPPI, Mitra Perempuan	CSW-60 mengadopsi sejumlah <i>outcome document</i> .	

		<p>Menteri Perempuan, Gender dan Pembangunan Komunitas Zimbabwe; dan <i>Parliamentary Under Secretary of State for International Development</i> Kerajaan Inggris.</p>			
	<p>Kunjungan Kerja ke Provinsi Kalimantan Barat</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyampaikan pengalaman dalam mengikuti sidang CSW ke-60 di Newyork yang membawa berbagai capaian perempuan di Indonesia, 2. Pembukaan Rakor Kelembagaan PP dan PA serta kampanye Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak menyampaikan Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia sangat rentan dengan tindak 	<p>Wakil Gubernur Kalbar, Christiandy Sanjaya, Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait, Pemda Kalimantan Barat,</p>	<p>Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memberikan perhatian kepada daerah-daerah di Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malayasia yang sangat rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang. 2. ke depan setiap puskesmas di Pontianak memiliki tempat khusus bermain anak saat orang tua sedang berobat 3. pihak SLB untuk menjaga anak-anak, jangan sampai ada kekerasan terhadap anak di sekolah dan ingin memastikan bahwa sekolah tersebut bebas dari tindak kekerasan. perlindungan anak. 	

		<p>pidana perdagangan manusia atau Illegal Trafficking.</p> <p>3. Mengunjungi Unit PPA Polresta Pontianak dan melihat data kasus kekerasan perempuan dan Anak yang terjadi di Kalimantan Barat.</p> <p>4. Mengunjungi puskesmas Karya Mulya. Puskesmas ini memiliki ruang khusus klinik pelayanan kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>5. Mengunjungi anak-anak disabilitas di Panti Asuhan Bhakti Luhur Pontianak dan memberikan sejumlah bantuan. Anak-anak disabilitas yang ditampung di panti ini sebagian besar merupakan anak-anak</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>penyandang disabilitas yang disebabkan karena aborsi</p> <p>6. Mengunjungi Shelter P2TP2A Bunga Lita di Jl. Abdulrachman Pontianak. Bertemu dengan anak-anak dari Forum Anak Kalbar, mengunjungi stand pameran industr kreatif binaan Badan PPPA&KB Kalbar, dan meninjau sejumlah ruangan di Shelter P2TP2A Bunga Lita.</p> <p>7. Meninjau Unit Kerja Latihan Industri di Jalan Abdul Rachman Saleh, yang menyelenggarakan Pelatihan dan Uji Keterampilan Tenaga Kerja dalam Berbagai Bidang Keterampilan Kerja Industri. Menteri Yohana meninjau ruang menjahit dan ruang</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>pelatihan keterampilan kecantikan</p> <p>8. Mengunjungi anak-anak di SLB Dharma Asih dan memberikan sejumlah bantuan.</p>			
	Kunker Sulut (Kunjungan Ke Kota Mubagu)	Dialog dengan masyarakat (perempuan dan anak) di Kota Mubagu.	Walikota Kota Mubagu dan Pemda Kota Mubagu	Pencanangan Kota Mubagu sebagai Kota Menuju Layak Anak sebagai bentuk komitmen kota Kota Mubagu dalam memenuhi hak dan melindungi anak.	
	Rapat Koordinasi Nasional Pembangunan PP dan PA , tanggal 31 Maret 2016	<p>Menerima rekomendasi hasil lokakarya tematik yang dilaksanakan pada 30 Maret 2016.</p> <p>Memberikan arahan untuk penyusunan program Badan PP-PA Provinsi dan Kabupaten/Kota.</p> <p>Melantik Satgas PPPA.</p> <p>Promosi gerakan HeforShe untuk mendorong partisipasi lebih aktif laki-laki dalam mewujudkan kesetaraan gender.</p>	Badan PP-PA Provinsi Badan PP-PA Kabupaten/kota	Badan PP-PA berkomitmen untuk menjabarkan 3 ends sebagai program unggulan daerah dan berkomitmen menindaklanjuti hasil Rakornas dalam pembahasan di Rakorda PP-PA masing-masing provinsi.	